

**STUDI POLA PENGGUNAAN TANAH DAN
STATUS PENGUASAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI BARITO
DI KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Program Diploma IV
Jurusan Perpetaan**



Diajukan Oleh :

M. FAHRIZAL ANSHARI.
NIM. 9981578.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

INTISARI

Daerah dan masyarakat Kota Banjarmasin memiliki ciri khas tersendiri, yaitu kebiasaan hidup di sekitar sungai yang digunakan untuk sarana transportasi dan komunikasi. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, secara fisik penggunaan dan penguasaan tanah oleh masyarakat Banjarmasin pada kawasan tersebut merupakan (termasuk) kawasan lindung yang disebut dengan sempadan sungai. Dengan orientasi kegiatan masyarakat yang berbasis air dan darat menimbulkan daya tarik peneliti untuk meneliti masalah-masalah pada Sungai Barito di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, yaitu *Pertama* bagaimana pola penggunaan tanah sempadan Sungai Barito, *Kedua* faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pola penggunaan tanah sempadan Sungai Barito, *Ketiga* bagaimana status penguasaan tanah sempadan Sungai Barito oleh masyarakat yang digunakan untuk tempat tinggal, *Keempat* apa permasalahan-permasalahan yang terjadi berkaitan dengan penggunaan dan penguasaan tanah sempadan Sungai Barito oleh masyarakat serta *Kelima* bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam mengatur penggunaan dan penguasaan tanah tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan survai. Jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang berupa peta, hasil wawancara dan dokumentasi dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu cara observasi, pedoman wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif yang disajikan dalam bentuk uraian dan tabel. Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik *area purposive sampling* sehingga didapat jumlah sampel sebanyak 103 orang.

Dari hasil penelitian untuk mengetahui pola penggunaan tanah di sempadan Sungai Barito pada Kecamatan Banjarmasin Barat dengan populasi (tidak ada sampel) yang diambil adalah kelurahan-kelurahan yang berada di sepanjang Sungai Barito, yaitu Kelurahan Kuin Cerucuk, Kelurahan Pelambuan, Kelurahan Telaga Biru dan Kelurahan Basirih. Sehingga penampakan pola penggunaan yang ada adalah berbentuk bintang radial dan memanjang sepanjang jalan atau sungai dengan kecenderungan pergeseran kearah pola konsentrik. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi pola penggunaan tanah tersebut adalah faktor non fisik yang terdiri dari sosial ekonomi masyarakat dan kultur budaya masyarakat Banjarmasin serta faktor fisik yang terdiri dari keadaan topografi dan sistem aksesibilitas/transportasi. Untuk status penguasaan tanah sempadan Sungai Barito oleh masyarakat adalah merupakan tanah negara yang dapat dibuktikan dengan bukti penguasaan berupa segel, surat jual beli dibawah tangan, dan surat pajak serta ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki bukti penguasaan tanah. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan dan penguasaan tanah sempadan Sungai Barito adalah, secara fisik/lingkungan hidup digambarkan telah terjadinya pencemaran Sungai Barito dengan menurunnya kualitas air sungai, dan terjadi erosi tebing sungai (*stream bank erosion*) serta tingginya sedimentasi sungai; sosial ekonomi masyarakat dan bagi pihak pemerintah daerah sendiri.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	8
A. Tinjauan Pustaka	8
1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	10

4. Kawasan Sempadan Sungai	21
5. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Sempadan Sungai	24
B. Kerangka Pemikiran.....	26
C. Definisi Konseptual atau Teoritis	30
D. Definisi Operasional	31
E. Jawaban Sementara Penelitian	33

BAB III METODE PENELITIAN 35

A. Lokasi Penelitian.....	36
B. Populasi dan Sampel	36
1. Populasi	36
2. Sampel	38
C. Teknik Pengambilan Sampel	39
D. Variabel dan Indikator Penelitian	42
E. Jenis dan Sumber Data	44
1. Data Primer	44
2. Data Skunder	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	47
1. Observasi	47
2. Wawancara	47
3. Studi Dokumentasi	48
G. Teknik Analisis Data	49

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 57

A. Keadaan Fisik Kecamatan Banjarmasin Barat	57
1. Letak Wilayah	57
2. Penggunaan dan Penguasaan Tanah	58
3. Sarana dan Prasarana	61

3. Pertumbuhan Penduduk	67
4. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Mata Pencaharian ..	68
BAB V HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	70
A. Pola Penggunaan Tanah Sempadan Sungai Barito Di Kecamatan Banjarmasin Barat	70
B. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Pola Penggunaan Tanah Sempadan Sungai Barito Pada Kecamatan Banjarmasin Barat ..	77
1. Sosial Ekonomi Masyarakat	77
2. Budaya / Kultur Masyarakat Yang Menguasai dan Menggunakan Tanah Sempadan Sungai Barito Di Kecamatan Banjarmasin Barat	87
3. Fisik Wilayah Kota Banjarmasin	89
C. Status Penguasaan Tanah Sempadan Sungai Barito Di Kecamatan Banjarmasin Barat	93
1. Status Tanah	93
2. Bukti Penguasaan Tanah	94
3. Lamanya Penguasaan Tanah	97
4. Cara Perolehan Tanah	99
5. Luas Penguasaan Tanah	100
D. Permasalahan–Permasalahan Yang Berkaitan dengan Penggunaan dan Penguasaan Tanah Sempadan Sungai Barito Di Kecamatan Banjarmasin Barat	100
1. Fisik atau Lingkungan Hidup	100
2. Sosial Ekonomi Masyarakat	107
3. Pemerintah Daerah	110
E. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Dalam Mengatur Penggunaan dan Penguasaan Tanah Sempadan	

2. Pengaturan Tata Ruang Fungsi-Fungsi Khusus atau Kawasan Khusus	115
3. Penyediaan Prasarana Perhubungan Dengan Pola Yang Teratur Sesuai Dengan Yang Diharapkan	116

BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Banjarmasin sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan memiliki ciri khas tersendiri dengan sebutan Kota Seribu Sungai. Hal ini disebabkan karena banyaknya sungai yang ada di wilayahnya. Terbentuknya Kota Banjarmasin merupakan suatu bentuk kelanjutan dari pola komunitas masyarakat suku banjar yang biasa menetap di kiri kanan sungai atau sempadan sungai. Pola permukiman masyarakat di pinggir sungai adalah cenderung linier sepanjang tepi sungai dengan orientasi menghadap jalur transportasi sungai itu sendiri (Iwan Suprijanto, 2001: 3).

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung menyatakan bahwa sempadan sungai adalah merupakan bagian dari kawasan perlindungan setempat, dan dalam Pasal 16 menyatakan bahwa kriteria sempadan sungai adalah untuk sungai besar sepanjang 100 meter di kiri kanannya dan untuk anak sungai sepanjang 50 meter di kiri kanannya yang berada di luar permukiman sedangkan untuk daerah permukiman, maka daerah sempadan sungainya adalah yang diperkirakan

Dilihat dari penguasaan oleh masyarakat pada daerah Kota Banjarmasin, akan terlihat adanya penguasaan tanah secara fisik dan yuridis, dimana penguasaan secara fisik diartikan dalam kenyataannya bahwa tanah dipergunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan penguasaan secara yuridis diartikan dengan bentuk bukti kepemilikan atas tanah.

Penguasaan secara fisik oleh masyarakat dimana tanah telah digunakan atau dimanfaatkan sejak lama, menimbulkan penampakan pola-pola penggunaan tanah sebagai dampak dari kegiatan manusia memanfaatkan tanah. Penampakan pola-pola penggunaan tanah dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor fisik dan faktor non fisik. Faktor fisik yang mempengaruhi pola penggunaan suatu daerah adalah keadaan wilayah/kondisi geografis berupa topografi, jenis tanah dan kesuburannya, kemampuan dan kesesuaian tanah serta aksesibilitas atau kemudahan dalam sarana transportasi. Sedangkan faktor non fisik adalah sosial ekonomi masyarakat dan budaya/kultur masyarakat.

Dengan kondisi geografis yang dimiliki Kota Banjarmasin, dimana pada daerah ini banyak terdapat sungai-sungai maupun anak sungai yang membelah Kota Banjarmasin mendorong terjadinya pola penggunaan tanah sempadan Sungai Barito terutama digunakan untuk permukiman atau

Dalam pola penggunaan tanah faktor budaya juga ikut mempengaruhi karena bagi masyarakat setempat akan memberi kemudahan transportasi air dengan orientasi kegiatan masyarakat yang berbasis air dan darat, khususnya perekonomian seperti perdagangan, pelabuhan dan perikanan (Iwan Suprijanto, 2001: 2). Selanjutnya pada bagian lain, disebutkan bahwa faktor sosial ekonomi masyarakat juga menjadi alasan terjadinya pola penggunaan tanah karena kawasan sempadan sungai dianggap oleh masyarakat perkotaan sebagai kawasan alternatif permukiman kota bagi kaum urbanis miskin. Permukiman atau perumahan masyarakat Kota Banjarmasin pada umumnya berbentuk rumah panggung, dimana bangunannya berkonstruksi lantai dasar berada di atas air atau sungai. Rumah panggung adalah merupakan tipologi mayoritas untuk rumah di atas air, yang juga merupakan tipologi bangunan tradisional di Indonesia.

Penguasaan tanah oleh masyarakat secara yuridis diartikan dengan adanya hubungan dengan tanah yang dilandasi oleh hak yang dilindungi oleh hukum yang dapat ditunjukkan dengan bukti kepemilikan penguasaan atas tanah. Pada daerah Kota Banjarmasin bukti-bukti kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat bermacam-macam dan untuk menjamin keamanan bagi pemiliknya haruslah mendapat legalitas secara hukum.

Dengan adanya penguasaan dan penggunaan tanah sempadan sungai

strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang. Di masyarakat permasalahan yang akan timbul pada dasarnya adalah jika masyarakat ingin mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh hak atas tanah. Dan bagi pemerintah adalah dalam penataan ruang, dimana pemanfaatannya diharapkan dapat optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Sedangkan di bidang lingkungan hidup, adanya penguasaan masyarakat tersebut harus memperhatikan kelestarian kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

Dengan keadaan demikian, penguasaan dan penggunaan tanah sempadan sungai oleh masyarakat haruslah memerlukan penanganan yang khusus dalam hal memberikan kepastian hukum dan kepastian hak atas oleh pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga non departemen yang menangani bidang pertanahan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“STUDI POLA PENGGUNAAN TANAH DAN STATUS PENGUASAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI BARITO DI KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan

1. Bagaimana pola penggunaan tanah sempadan Sungai Barito di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pola penggunaan tanah sempadan Sungai Barito Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tersebut?
3. Bagaimana status penguasaan tanah sempadan Sungai Barito oleh masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan?
4. Apa permasalahan-permasalahan yang terjadi, berkaitan dengan penggunaan dan penguasaan tanah sempadan Sungai Barito oleh masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan?
5. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam mengatur penggunaan dan penguasaan tanah sempadan sungai tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pola penggunaan tanah sempadan Sungai Barito di

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pola penggunaan tanah sempadan Sungai Barito di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
- c. Untuk mengetahui status penguasaan tanah sempadan Sungai Barito oleh masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
- d. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi, berkaitan dengan penggunaan dan penguasaan tanah sempadan Sungai Barito oleh masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
- e. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam mengatur penggunaan dan penguasaan tanah sempadan sungai.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Diharapkan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang pertanian, khususnya pola penggunaan tanah dan penguasaan tanah di wilayah sempadan sungai.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat dalam pengembangan kajian pertanian, khususnya penguasaan hak atas

- c. Diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan untuk pengambilan kebijakan di bidang pertanahan sebagai pelaksanaan kewenangan pembangunan di daerah.
- d. Serta bagi para pembaca atau pemerhati dalam bidang pertanahan dan sosial masyarakat kawasan perairan/ sempadan sungai.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pola penggunaan tanah sempadan Sungai Barito di Kecamatan Banjarmasin Barat.

Pola penggunaan tanah sempadan Sungai Barito di Kecamatan Banjarmasin Barat yang nampak adalah berbentuk bintang radial dan memanjang sepanjang jalan atau sungai. Dan dengan adanya sistem jaringan jalan yang terdapat pada Kecamatan Banjarmasin Barat yang berpola jalan radial (jalan poros) dan penambahan sistem jaringan jalan lingkaran utara dan selatan Kota Banjarmasin serta jalan lingkaran yang menghubungkan dari seluruh kawasan kota pola penggunaan tanah tersebut menyebabkan adanya kecenderungan perubahan kearah konsentrik yaitu perkembangan yang menyebar tetapi tetap berorientasi ke pusat Kota Banjarmasin.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola penggunaan tanah sempadan Sungai Barito di Kecamatan Banjarmasin Barat.

Faktor yang mempengaruhi pola penggunaan tanah sempadan Sungai Barito di Kecamatan Banjarmasin Barat adalah faktor non fisik

pertumbuhan penduduk yang tinggi, komposisi penduduk menurut tingkat mata pencaharian sebagian besar adalah sebagai buruh dan komposisi penduduk menurut tingkat pendapatan yang sedang serta faktor budaya/kultur yang dimiliki oleh masyarakat sangat berpengaruh terhadap pola penggunaan tanah sempadan Sungai Barito di Kecamatan Banjarmasin Barat.

Adapun faktor fisik yang mempengaruhi pola penggunaan tanah sempadan Sungai Barito adalah secara topografi Kota Banjarmasin terletak di daerah relatif datar dan di dataran rendah dengan memiliki banyak sungai beserta anak sungai dengan pola mendaun yang menuju ke sungai utama yaitu Sungai Barito yang digunakan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi dan tempat tinggal. Sedangkan dari aksesibilitas atau jaringan jalan mempengaruhi terhadap kecenderungan perubahan pola penggunaan tanah ke arah konsentrik.

3. Status penguasaan tanah sempadan Sungai Barito di Kecamatan Banjarmasin Barat.

Status tanah yang ada adalah merupakan penguasaan terhadap tanah negara, dimana bukti penguasaan tanah sempadan Sungai Barito yang dimiliki oleh masyarakat sebagian besar adalah segel sebanyak 30 atau 29,13 % dan yang tidak memiliki bukti penguasaan tanah sebanyak 46 atau 44,66 %. Untuk lamanya penguasaan tanah sempadan Sungai

sebanyak 79 orang atau 76,70 %. Dan luas penguasaan tanah sempadan Sungai Barito yang dikuasai oleh masyarakat pada umumnya adalah cukup sebatas untuk mendirikan bangunan rumah yang tidak lebih dari 200 m².

4. Permasalahan–permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan dan penguasaan tanah sempadan Sungai Barito.

Permasalahan secara fisik atau lingkungan hidup dari penguasaan tanah sempadan Sempadan Sungai Barito oleh masyarakat adalah terjadinya erosi tanah sungai dengan jenis erosi tebing sungai (*stream bank erosion*) dan sedimentasi pada alur Sungai Barito serta kualitas air yang menurun.

Untuk permasalahan secara sosial ekonomi masyarakat adalah secara umum masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi mayoritas golongan ekonomi lemah dengan latar belakang pendidikan serta pengetahuan akan lingkungan sehat yang cenderung relatif terbatas sehingga menimbulkan kebiasaan tidak sadar lingkungan dan pola hidup yang kurang memperhatikan bahaya dan resiko.

Sedangkan permasalahan dari penguasaan tanah sempadan sungai bagi Pemerintah Kota Banjarmasin adalah tidak bisa berbuat banyak terhadap penguasaan tanah tersebut yang telah berlangsung sejak lama dan sudah menjadi tradisi kebiasaan masyarakat Kota Banjarmasin. Dan untuk penanganan pencemaran terhadap sungai oleh pemerintah telah berupaya

5. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam mengatur penggunaan dan penguasaan tanah sempadan Sungai Barito.

Tidak adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin yang secara khusus dalam menetapkan kawasan sempadan Sungai Barito sebagai kawasan lindung dan pelarangan penggunaan pada daerah Sungai Barito dari segala kegiatan manusia.

Dan ditinjau dari Rencana Teknik Ruang Kota Wilayah Banjarmasin Barat Tahun 1994-2004 pada kawasan sempadan Sungai Barito diperuntukkan bagi kawasan pusat industri bagi wilayah Kota Banjarmasin, kawasan pemukiman penduduk terutama penduduk yang berpencaharian di bidang industri atau di kawasan industri, kawasan perdagangan atau jasa, dan tempat wisata.

Peruntukan kawasan-kawasan tersebut juga dilengkapi dengan pembangunan sistem jaringan jalan guna mendukung tata ruang kota yang sesuai dengan daya dukung kota dan mendukung 5 (lima) fungsi Kota Banjarmasin.

B. Saran.

1. Dengan adanya penggunaan dan penguasaan tanah sempadan Sungai Barito oleh masyarakat di Kecamatan Banjarmasin khususnya dan Kota Banjarmasin secara umum diharapkan tanggapan dari Pemerintah Kota Banjarmasin untuk membuat suatu kebijakan atau peraturan yang

2. Kota Banjarmasin sebagai kota air atau kota dengan seribu sungainya, diharapkan adanya upaya Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin untuk melakukan penataan kota khususnya untuk permukiman penduduk di kawasan sempadan Sungai Barito sehingga akan tercipta suatu potensi daya tarik wisata yang unik dan menarik.
3. Perlunya penanganan secara serius terhadap penanggulangan atau meminimalisasi pengrusakan lingkungan Sungai Barito dari pencemaran air sungai, erosi tebing sungai dan sedimentasi

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi III, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Kota Banjarmasin, 2002, *Fakta Dan Analisis Tata Ruang Kota Banjarmasin*, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Banjarmasin, Banjarmasin.
- Budihardjo, Eko, 1992, *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*, Alumni, Bandung.
- Daldjoeni, N, 1987, *Geografi Kota Dan Desa*, Alumni, Bandung.
- Fardiaz, Srikandi, 1992, *Polusi Air Dan Udara*, Kanisius, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, 1996, *Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 1997, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Indradi, I.G., 2002, *Tata Guna Tanah-Penatagunaan Tanah*, STPN, Yogyakarta.
- Juhana, 2001, *Arsitektur Dalam Kehidupan Masyarakat : Pengaruh Bentukan Arsitektur dan Iklim Terhadap Kenyamanan Thermal Rumah Tinggal Suku Bajo Di Wilayah Pesisir Bajoe Kabupaten Bone Sulawesi Selatan*, Bendera, Semarang.
- Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat, 2003, *Monografi Data Pokok*

- Kartono, Hadi dan Sugeng Rahardjo serta I Made Sandy, 1989, *Esensi Pembangunan Wilayah Dan Penggunaan Tanah Berencana*, Geo-FMIPA Universitas Indonesia, Jakarta
- Nawawi, Hadari, 1998, *Metode Penelitian Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sandy, I Made, 1995, *Tanah Muka Bumi UUPA 1960-1995*, PT. Indograph Bhakti-FMIFA-UI, Jakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 1996, *Pedoman Penulisan Skripsi*, STPN, Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, Edisi Revisi, LP3ES, Jakarta.
- Sumadi, Herutomo, 2002, *Pedoman Praktis Penyusunan Usulan Penelitian dan Penulisan Skripsi*, STPN, Yogyakarta.
- Sumadi, Herutomo, 1997, *Kebijakan Tata Ruang Kota Dan Tata Guna Tanah*, STPN, Yogyakarta.
- Suprijanto, Iwan, 2001, *Karakteristik Spesifik, Permasalahan dan Potensi Pengembangan Kawasan Kota Tepi Laut atau Pantai (Coastal City) Di Indonesia*, Prossiding Studi Dampak Timbal Balik Antar Pembangunan Kota dan Perumahan Di Indonesia dan Lingkungan Global, Puslitbang Permukiman, Jakarta.
- Suprijanto, Iwan, 2001, *Rumah Atas Air-Karakteristik dan Permasalahannya*, Puslitbang Permukiman, Jakarta.

- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul, 1997, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wahyu, dan M. Masduki, 1987, *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Walijatun, Djoko, 1998, *Tinjauan Aspek Penyimpangan dan Kejahatan di Bidang Pertanahan*, Makalah Seminar Reformasi Pertanahan, Media Fajar Group, tanggal 27-28 Oktober 1998, Ujung Pandang.
- Wardhana, Wisnu Arya, 1999, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Wiradi, Goenawan, 2002, *Pembaruan Agraria Anak Kandung Konflik Agraria, Konflik Agraria Anak Kandung "Pembaruan" Agraria*, Makalah Seminar Nasional Pertanahan 2002, tanggal 16 Juli 2002, Yogyakarta.
- Yunus, Hadi Sabari, 2001, *Struktur Tata Ruang Kota*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 1994 tentang Rencana Teknik Ruang Kota Wilayah Banjarmasin Barat Tahun 1994 – 2004.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pola Dasar